

Ombudsman Tengahi Kisruh Tanah Tol Cijago

DEPOK — Ombudsman turun tangan untuk menengahi kisruh harga tanah yang dibebaskan untuk jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago). Kisruh ini terjadi antara para pemilik tanah di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, dan Pemerintah Kota Depok.

Anggota Ombudsman Bidang Pencegahan, Hendra Nurtjahjo, mengatakan lembaganya akan menemui lagi Wali Kota Depok dan Sekretaris Daerah Kota Depok pada pekan depan. "Kami meminta klarifikasi ihwal pembagian zona harga tanah di kawasan tersebut," kata Hendra kemarin.

Panitia Pembebasan Tanah menetapkan harga tanah ditentukan berdasarkan zona dengan kisaran Rp 1,5-2 juta per meter. Padahal warga Kukusan meminta harga tanah disamakan, yakni Rp 5 juta per meter. Warga juga menilai sosialisasi zonasi harga ini masih kurang.

Dalam pertemuan Ombudsman dengan Wali Kota Depok dan Sekretaris Daerah, Jumat pekan lalu, tidak dibahas perihal zonasi harga tanah. Menurut Hendra, pertemuan itu

hanya membicarakan keluhan warga Kukusan mengenai harga tanah. Ombudsman meminta agar Pemerintah Kota mengkaji ulang *appraisal* (penilaian) tanah tersebut.

Masalah zonasi harga tanah ini muncul dalam pertemuan dengan warga yang digelar secara mendadak oleh Pemerintah Kota, Senin lalu. Warga yang tidak puas atas sosialisasi ini kemudian mengadu lagi kepada Ombudsman, dua hari kemudian. Hendra menilai Pemerintah Kota Depok tidak transparan dalam menentukan harga tanah. "Hal ini mengindikasikan adanya kejanggalan atau ketidakwajaran dalam proses pembebasan tanah tersebut."

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Depok, Dudi Miraz — yang juga anggota Panitia Pembebasan Tanah — membela diri bahwa zonasi itu sudah berlaku sejak awal. Dia mengakui pertemuan pada Senin lalu hanya memaparkan harga setiap zonasinya. "Ada enam zonasi, dan harga setiap zonasi itu naik signifikan dibanding pada 2013," kata dia. ● ILHAM TIRTA